



RENSTRA

TAHUN 2025-2029

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

KOTA BANJARBARU

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kota Banjarbaru 2025-2029, maka perlu menyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara sistimatis, terarah, dan terpadu, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis.

Adapun penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan penyusunan secara rinci mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029.

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 terdiri dari pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan Penutup.

Rancangan ini menjadi landasan untuk Menyusun Rencana Strategis merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan penyusunan RPJMD dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya. Rancangan Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.



Banjarbaru, 10 Juli 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Banjarbaru

Ir. EKA YULIESDA AKBARI, ST.MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19730727 199803 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.1.1 Pengertian Renstra SKPD	8
1.1.2 Fungsi Renstra SKPD Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	9
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra SKPD	9
1.1.4 Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD	10
1.2 Landasan Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.3.1 Maksud	12
1.3.2 Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	15
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.2.2 Isu Strategis	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	36
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra	36
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	40



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	45
4.1 Program, kegiatan dan subkegiatan	45
4.1.1 Program Bidang Urusan.....	45
4.1.2 Kegiatan Bidang Urusan	45
4.1.3 Sub Kegiatan Bidang Urusan	47
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	93
4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	96
4.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100
BAB V PENUTUP	102



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia ASN Berdasarkan Eselon	18
Tabel 2. 2 Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Golongan	19
Tabel 2. 3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian.....	19
Tabel 2. 4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2. 5 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Diklat yang diikuti	20
Tabel 2. 6 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Diklat yang diikuti	20
Tabel 2. 7 Daftar Asset / Modal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru s/d Tahun 2020	21
Tabel 2. 8 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Periode sebelumnya	24
Tabel 2. 9 Tabel Isu Strategis Perangkat Daerah	35
Tabel 3. 1 Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun	39
Tabel 3. 2 Penahapan Pembangunan Renstra PD	41
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra PD	43
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD ..	74
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	92
Tabel 4. 3 Tabel Program Prioritas	93
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100
Tabel 4. 6 Indikator Pelayanan Minimal SPM	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra SKPD yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan RPJMD	10
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan (Kerzner, 2001). Sedangkan dalam pemerintah daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

RENSTRA atau Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :” Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD” dan “Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah”. Dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan : ”Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.1.1 Pengertian Renstra SKPD

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 272 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD” dan “Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Selain yang ditunjukkan dalam Undang-Undang tersebut, pada Undang-Undang lainnya terutama pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun”.

Dengan memperhatikan uraian-uraian pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru merupakan dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

untuk periode Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, strategi, dan kebijakan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029.

1.1.2 Fungsi Renstra SKPD Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menguraikan rincian daftar program, kegiatan dan sub kegiatan serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan.

Selain itu juga dapat dinyatakan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah sangat dibutuhkan sebuah satuan kerja perangkat daerah karena :

1. Sebagai terjemahan praktis dari tujuan dan sasaran PD.
2. Sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional PD.
3. Sebagai kerangka acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan PD.
4. Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan SKPD dalam periode lima tahunan.
5. Sebagaijabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis PD.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra SKPD

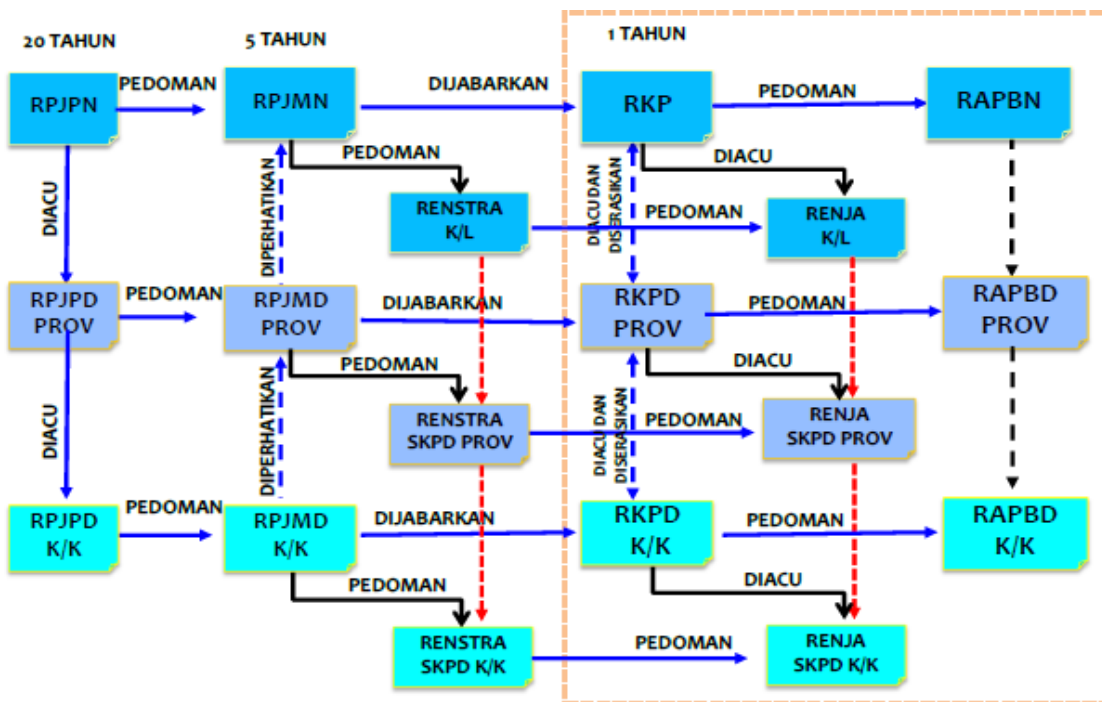
Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarbaru melalui beberapa tahapan. Setiap tahapan membutuhkan proses kajian yang mendalam. Adapun tahapan penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

2. Tahapan penyusunan rancangan Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
3. Tahapan penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
4. Tahapan penetapan Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

1.1.4 Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD

Untuk mengetahui keterkaitan antara Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD dijelaskan dalam Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1 Hubungan Renstra SKPD yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan RPJMD

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai landasan hukum yakni antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).
- h. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
- i. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32)
- j. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

- k. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Awal penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 disusun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan maksud sebagai landasan untuk melaksanakan capaian tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tercapainya visi, misi dan program yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat terarah, efektif, efisien dan terpadu yang mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 juga akan menjadi acuan dan pedoman resmi seluruh Bidang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam penyusunan Rencana Kerja

Tahunan. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah ini juga sebagai bahan dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara berjenjang.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan maksud di atas penyusunan Rencana Strategis PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 ini bertujuan untuk :

- a. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru ke dalam strategi pembangunan yang terarah, terinci, terukur dan integratif sehingga dapat diimplementasikan sejak Tahun 2025 hingga Tahun 2029.
- b. Menjadi acuan resmi bagi seluruh unit organisasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai landasan dalam penetapan indikator kinerja dalam rangka evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- d. Mewujudkan proses administrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah



- 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DANA ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan
- 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- 4.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas dan Fungsi

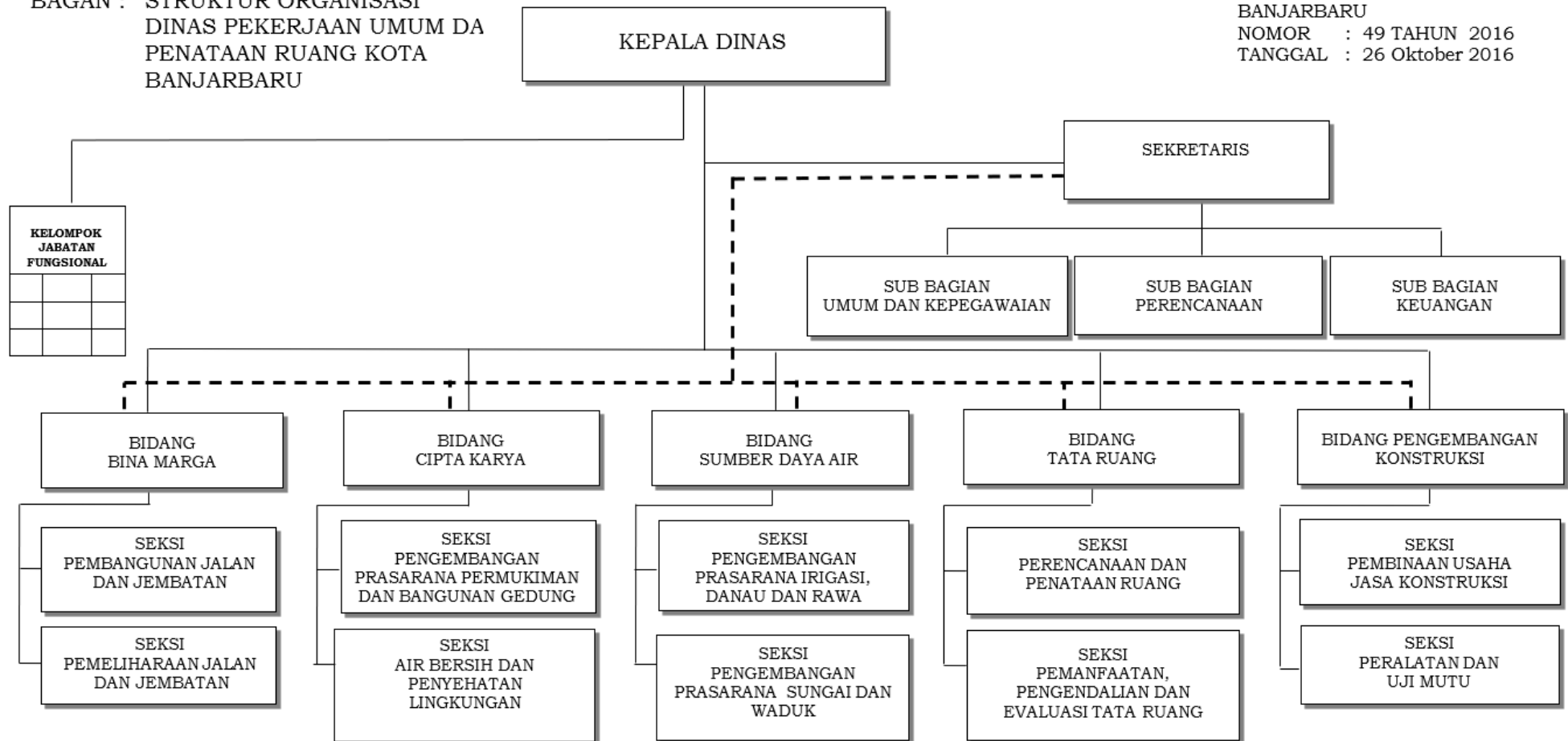
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa;
 - b. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk.
4. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung.
6. Bidang Pengembangan Konstruksi , terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
 - b. Seksi Pemelihara Peralatan dan Uji Mutu
7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang.

Untuk lebih jelasnya mengenai Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dapat dilihat di bawah ini :

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DA
PENATAAN RUANG KOTA
BANJARBARU

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA KOTA
BANJARBARU
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

———— : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru saat ini memiliki sumber daya manusia sebanyak 110 orang yang terdiri dari 59 orang ASN, 30 orang PTT/Tenaga Kontrak.

Berdasarkan eseloning yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru maka jumlah pejabat eselon 2.b sebanyak 1 (satu) orang, pejabat eselon eselon 3.a sebanyak 1 (satu) orang, pejabat eselon 3.b sebanyak 5 (lima) orang, dan pejabat eselon 4.a sebanyak 13 (tiga belas) orang. Secara rinci bisa dilihat pada table berikut ini :

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	II	1 orang	
2.	III	6 orang	
3.	IV	13 orang	
Jumlah		20 orang	

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia ASN Berdasarkan Eselon

A. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian dan proyeksi kebutuhan pegawai s/d 2030)

Jumlah ASN yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru berdasarkan golongan ruang yang dimiliki yaitu Golongan ruang IV.c sebanyak 2 (dua) orang, Golongan ruang VI.b sebanyak 1 (satu) orang, Golongan ruang VI.a sebanyak 8 (delapan) orang. Adapun pegawai yang mempunyai Golongan ruang III sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, Golongan ruang II sebanyak 5 (lima) orang, dan pegawai yang mempunyai Golongan ruang 1 sebanyak 1 (satu) orang. Secara rinci bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Berdasarkan jumlah PNS yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru maka berdasarkan golongan ruang terdapat 11 (sebelas) orang yang mempunyai golongan IV, 28 (dua puluh delapan) orang mempunyai golongan III, 5 (lima) orang mempunyai golongan ruang II, dan 1 (satu) orang mempunyai golongan I. Secara rinci bisa dilihat pada table berikut ini :

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	11 orang	
2.	III	28 orang	
3.	II	5 orang	
4.	I	1 orang	
Jumlah		45 orang	

Tabel 2. 2 Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Golongan

No	Status	Jumlah	Keterangan
1.	Aparatur Negeri Sipil	60 orang	
2.	Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak	43 orang	
Jumlah		103 orang	

Tabel 2. 3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S2)	15 orang	Laki-Laki : 8 orang Perempuan : 7 orang
2.	Sarjana (S1)/DIV	55 orang	Laki-Laki : 27 orang Perempuan : 28 orang
3.	Sarjana Muda (DIII)/Akademi	14 orang	Laki-Laki : 7 orang Perempuan : 7 orang
4.	SMA	12 orang	Laki-Laki : 7 orang Perempuan : 5 orang
5.	SD	1 orang	Laki-Laki : 1 orang Perempuan : 0 orang
Jumlah		110 orang	

Tabel 2. 4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Diklat/Kursus	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim Tk. II	1 orang	Lulus
2.	Diklatpim Tk.III	6 orang	Lulus

3.	Diklatpim Tk.IV	12 orang	Lulus
Jumlah		19 orang	

Tabel 2. 5 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Diklat yang diikuti

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	44 orang	PNS : 30 orang PTT/Tenaga Kontrak : 14 orang
2.	Perempuan	37 orang	PNS : 18 orang PTT/Tenaga Kontrak : 19 orang
Jumlah		81 orang	

Tabel 2. 6 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Diklat yang diikuti

B. Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register
1	2	3
1	Aspalt Cutter	4 buah
2	Air Conditioning Unit	7 buah
3	Lemari Besi	9 buah
4	Meja Makan	2 buah
5	Kursi Rapat	20 buah
6	Lemari Es	1 buah
7	Dispenser	2 buah
8	Televisi	2 buah
9	Filling Besi/Metal	1 buah
10	LCD Proyektor	1 buah
11	Kursi Tamu	2 buah
12	Kursi Putar	17 buah
13	Kursi Lipat	12 buah

14	Sofa	4 buah
15	PC Unit/Komputer	10 buah
16	Laptop	3 buah
17	Printer	13 buah
18	Meja Kerja	15 buah
19	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	1 buah
20	Drill Machine	1 buah
21	Concrete Hammer Test	2 buah
22	Core Sampler	1 buah
23	Meja Tamu Ruangan Biasa	1 buah
24	Lensa Kamera	1 buah
25	Papan Bergerak	1 buah
Jumlah		133 buah

Tabel 2. 7 Daftar Asset / Modal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru s/d Tahun 2020

2.1.3 Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Renstra SKPD Periode sebelumnya merupakan data dan informasi yang menggambarkan pencapaian – pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra SKPD Periode 2025 – 2029. Dalam Renstra SKPD Periode 2025 – 2029 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target (Renstra 2024)	Realisasi s/d 2024	%
I. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Kualitas Pelayanan Publik					
1.	Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100
2.	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100
3.	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	%	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target (Renstra 2024)	Realisasi s/d 2024	%
4.	Indeks kepuasan masyarakat bidang Tata Ruang	Opini	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (82)	100
5.	Indeks kepuasan masyarakat bidang Pengembangan Konstruksi	Opini	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (82)	100
6.	Tersedianya layanan Informasi Usaha Jasa Konstruksi	%	100	100	100
Rata-rata capaian					100
II. Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas untuk Mendukung Konektivitas antar Wilayah					
1.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	81,66	76,05	93,13
2.	Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	%	97,87	96,94	99,05
Rata-rata capaian					96,09
III. Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata					
1.	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	100	94,50	94,50
2.	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	96,93	100	103,17
Rata-rata capaian					98,83
IV. terselesaikannya Permasalahan Banjir dan Genangan					
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	88,30	71,70	81,20
2.	Persentase penanganan titik rawan banjir	%	60	60	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target (Renstra 2024)	Realisasi s/d 2024	%
Rata-rata capaian					90,60
V. Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk Mendukung Produksi Pertanian					
1.	Persentase kinerja sistem irigasi	%	74,87	72,80	97,23
Rata-rata capaian					97,23
VI. Terwujudnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik yang Berkualitas					
1.	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100
2.	Persentase sarana publik dalam kondisi baik	%	100	99,70	99,70
Rata-rata capaian					99,85
VII. Terwujudnya Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota yang Konsisten					
1.	Persentase jumlah bobot dokumen teknis rencana tata ruang yang telah disusun	%	100	100	100
2.	Prosentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	%	100	100	100
Rata-rata capaian					100
VIII. Meningkatkan Kualitas RTH Publik					
1.	Persentase RTH publik yang tersedia	%	10,28	10,28	100
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	100	99,62	99,62

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target (Renstra 2024)	Realisasi s/d 2024	%
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	%	100	100	100
	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	53,19	56,45	106,13
	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	79,88	79,12	99,05
	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	53,19	56,45	106,13
	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	79,88	79,12	99,05
	Tingkat kemantapan jalan kota	%	81,42	85,26	104,72
	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	63,15	63,93	100,66
	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100
Rata-rata capaian					100

Tabel 2. 8 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Periode sebelumnya

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Rasio
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 777.836.700	Rp. 770.383.786	93,15
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 33.107.800	Rp. 28.707.186	86,71

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 744.728.900	Rp. 741.676.600	99,59
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.677.100.720	Rp. 7.125.416.047	88,42
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.513.279.920	Rp. 6.988.100.147	93,01
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 163.820.800	Rp. 137.315.900	83,82
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 24.822.350	Rp. 23.864.300	96,14
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 24.822.350	Rp. 23.864.300	96,14
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 42.680.000	Rp. 37.865.000	96,94
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 42.680.000	Rp. 37.865.000	96,94
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.170.172.300	Rp. 1.006.456.534	91,3
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 105.866.500	Rp. 90.154.250	85,16
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 234.743.000	Rp. 191.207.807	81,45
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 31.609.800	Rp. 31.555.050	99,83
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 9.600.000	Rp. 9.600.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 657.295.000	Rp. 557.414.427	84,8
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 131.058.000	Rp. 126.525.000	96,54
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.204.353.480	Rp. 1.135.532.000	94,55
	Pengadaan Mebel	Rp. 328.918.600	Rp. 296.577.000	90,17
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 247.504.000	Rp. 244.620.000	98,83
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 627.930.880	Rp. 594.335.000	94,65
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 659.501.400	Rp. 524.895.639	78,44
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 243.000.000	Rp. 180.037.668	74,09
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 416.501.400	Rp. 344.857.971	82,8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.006.597.650	Rp. 1.915.049.445	95,44
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Rp. 47.610.150	Rp. 39.797.150	83,59

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 635.787.500	Rp. 565.824.230	89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp. 205.000.000	Rp. 202.695.615	98,88
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 88.000.000	Rp. 86.142.450	97,89
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 1.000.000.000	Rp. 992.505.000	99,25
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 30.200.000	Rp. 28.085.000	93
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 42.530.327.770	Rp. 40.754.907.705	95,6
	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rp. 2.804.868.170	Rp. 2.700.368.165	96,27
	Peningkatan Tanggul Sungai	Rp. 32.742.216.350	Rp. 31.459.699.240	96,08
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Rp. 6.983.243.250	Rp. 6.594.840.300	94,44
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.174.425.000	Rp. 4.453.870.820	83,68
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp. 2.348.964.000	Rp. 2.207.050.500	93,96
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp. 1.167.845.500	Rp. 851.799.820	72,94
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp. 1.657.615.500	Rp. 1.395.020.500	84,16
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.462.245.000	Rp. 12.879.472.000	95,67
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp. 13.462.245.000	Rp. 12.879.472.000	95,67
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.387.902.450	Rp. 13.538.694.200	94,43
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rp. 4.715.699.750	Rp. 4.128.554.500	87,55
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp. 1.476.879.000	Rp. 1.457.836.000	98,71
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp. 8.176.072.000	Rp. 7.952.303.700	97,03
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.327.599.285	Rp. 25.053.548.085	94,19
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp. 6.274.354.900	Rp. 5.982.973.500	95,36
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rp. 1.774.137.150	Rp. 1.689.959.685	95,26
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Rp. 6.227.153.600	Rp. 6.101.168.800	97,98
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Rp. 2.199.779.260	Rp. 1.922.771.600	87,41
	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Rp. 9.852.174.375	Rp. 9.356.674.500	94,97
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 68.108.843.950	Rp. 64.545.133.967	81,9
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 66.773.061.000	Rp. 63.630.112.967	95,29
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.335.782.950	Rp. 915.021.000	68,5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 109.228.804.250	Rp. 103.995.444.850	95,21
	Pembangunan Jalan	Rp. 4.187.314.900	Rp. 4.009.608.300	95,76
	Rekonstruksi Jalan	Rp. 51.617.015.700	Rp. 49.285.804.800	95,48

	Rehabilitasi Jalan	Rp. 14.864.339.200	Rp. 14.209.206.700	95,59
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp. 27.840.911.800	Rp. 26.644.824.600	95,7
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp. 6.284.294.100	Rp. 5.775.395.900	91,9
	Pembangunan Jembatan	Rp. 1.273.000.250	Rp. 1.221.613.450	95,96
	Rehabilitasi Jembatan	Rp. 2.652.564.050	Rp. 2.566.717.850	96,76
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp. 509.364.250	Rp. 282.273.250	55,42
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.225.000	Rp. 54.401.500	98,54
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp. 29.425.000	Rp. 28.835.150	98
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Rp. 25.800.000	Rp. 25.566.350	99,09
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp. 78.600.000	Rp. 78.366.500	99,77
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rp. 34.684.000	Rp. 34.470.500	99,38
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rp. 24.303.000	Rp. 24.283.000	99,92
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rp. 19.613.000	Rp. 19.613.000	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Rp. 2.954.179.000	Rp. 2.777.889.226	96,14
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Rp. 264.085.000	Rp. 260.652.000	98,7
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp. 2.690.094.000	Rp. 2.517.237.226	93,57
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 228.925.000	Rp. 173.955.000	75,99
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 228.925.000	Rp. 173.955.000	75,99

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 210.628.000	Rp. 196.221.000	93,16
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp. 210.628.000	Rp. 196.221.000	93,16

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru biasanya mencakup berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan Kesehatan yang spesifik. Berikut adalah beberapa kelompok sasaran layanan yang umumnya ada dalam Renstra Dinas Kesehatan :

1. Masyarakat umum

Kelompok ini mencakup seluruh penduduk yang memerlukan layanan kesehatan dasar seperti imunisasi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pencegahan penyakit, jaminan kesehatan dan lainnya.

2. Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

Layanan khusus seperti pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan, konseling laktasi, kesehatan reproduksi ibu hingga pemantauan tumbuh kembang bayi.

3. Anak-anak dan Remaja

Layanan pemeriksaan kesehatan anak, layanan imunisasi, pelayanan gizi, serta pelayanan Kesehatan yang berfokus pada Kesehatan anak dan remaja.

4. Lanjut Usia

Layanan pemeriksaan kesehatan dasar untuk lansia termasuk skrining penyakit, deteksi dini masalah kesehatan lanjut usia, pelayanan posyandu, dan pelayanan komprehensif dan terpadu.

5. Penderita Penyakit Tidak Menular (PTM)

Meliputi layanan deteksi dini, pencegahan dan penanganan penyakit seperti hipertensi, diabetes, jantung, kanker yang memerlukan pelayanan pengelolaan penyakit jangka panjang dan pencegahan komplikasi.

6. Penderita Penyakit Menular

Layanan pengendalian penyakit menular seperti tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, malaria dan penyakit infeksi lainnya.

7. Kelompok Rentan

Layanan terhadap masyarakat disabilitas, korban bencana alam, serta kelompok fakir miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan tambahan atau lebih mudah diakses.

8. Pekerja dan Pengusaha

Layanan kesehatan bagi pekerja, lingkungan kerja yang sehat serta pengelolaan resiko Kesehatan di tempat kerja.

9. Masyarakat dengan Kesehatan Resiko Kesehatan Tinggi

Kelompok ini mencakup orang-orang dengan faktor resiko tinggi terhadap penyakit tertentu, atau memiliki riwayat keluarga dengan penyakit tertentu.

Dalam Renstra Dinas Kesehatan masing-masing kelompok sasaran ini memerlukan pendekatan yang berbeda untuk memastikan pencapaian indikator Kesehatan yang ditetapkan dan untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan secara optimal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan SKPD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Adapun fungsi pelayanan SKPD Dinas PU&PR Kota Banjarbaru terutama berkaitan terhadap penyediaan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang di wilayah Kota

Banjarbaru dalam kondisi baik dan terakses/terjangkau oleh seluruh masyarakat Kota Banjarbaru. :

Sejak dimulainya era desentralisasi yang diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, aparatur agar memiliki kemampuan, keterampilan, organisasi dan manajemen yang baik sehingga dapat melaksanakan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menentukan sendiri kebijakan pembangunan daerahnya. Salah satunya adalah wewenang pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di daerahnya.

Dalam rangka turut mempercepat proses pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempersiapkan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Perencanaan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi SKPD untuk mencapai target-target yang hendak dicapai. Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah dokumen Rencana Strategis SKPD atau Renstra SKPD. Merupakan dokumen yang berisi tentang Program Strategi Pembangunan yang ingin diwujudkan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam lima tahun kedepan.

Namun demikian penentuan target – target dan indikator kinerja Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) ini tentunya bukan tanpa masalah, pencapaian pembangunan infrastruktur yang ingin dicapai dan tertuang di Renstra SKPD kadang tidak sesuai / mencapai target yang telah ditetapkan.

Di samping itu juga, organisasi publik (dalam hal ini SKPD) seringkali dipersepsikan sebagai organisasi yang lemah dalam persoalan akuntabilitas. Minimal ada 2 (dua) sebab utama lembaga publik dipersepsikan seperti itu, yaitu Pertama, lemahnya sisi indikator kinerja dalam menyusun suatu program atau kegiatan. Kedua, kurang

jelasnya tugas pokok dan fungsi untuk menjabarkan indikator kinerja (Solihin, 2007). Akuntabilitas tidak hanya ditekankan pada saat evaluasi pembangunan, namun tak kalah penting adalah pada saat perencanaan. Akuntabilitas pada tahap perencanaan menekankan pada pertanggungjawaban penilaian kinerja pada tahap perencanaan (ex-ante), yakni sejauh mana perencanaan dapat memberikan gambaran dan ukuran-ukuran yang tepat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, maka akuntabilitas perencanaan menetapkan pada penetapan indikator-indikator kinerja sebagai basis penilaian atau memperjelas tentang what, how, who dan when suatu program dan kegiatan akan dilaksanakan. Disamping itu, indikator kinerja juga berfungsi menciptakan konsensus yang dibangun oleh Stakeholders serta membangun dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja pembangunan.

Masalah penting lainnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan pendanaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur kota yang dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan pendanaan pembangunan selalu berada di atas kemampuan keuangan pemerintah daerah, sehingga untuk menghadapi permasalahan pembangunan ini dibutuhkan sinergitas dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian/Lembaga.

Disamping permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut, Kota Banjarbaru juga kini tengah dihadapi oleh beberapa tantangan strategis. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik.

Kendala-kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain :

- 1) Terbatasnya ketersediaan anggaran pembangunan sehingga pembangunan untuk penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas belum dapat terlaksana secara optimal. Demikian pula

penyediaan RTH juga belum dapat tercapai sesuai ketentuan karena anggaran untuk pengadaan lahan RTH dan pembangunannya terbatas,

2) Dinamika perkembangan kota yang pesat dan pertumbuhan lahan terbangun menyebabkan berkurangnya luasan daerah resapan air/tutupan

3) Belum tersedianya dokumen rencana rinci tata ruang

4) Kendala birokrasi dan keterbatasan SDM

Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

a. Masih kurangnya konektivitas menuju kawasan strategis.

b. Masih ditemukannya kawasan rawan banjir

c. Masih belum tercapainya RTH sesuai ketentuan

d. Masih belum tercapainya standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut menyangkut peluang dan tantangan, serta kekuatan dan kelemahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi atau mendukung tercapainya tujuan

pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis.

Memperhatikan permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD dan juga telah ditetapkan Visi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan Kota Banjarbaru Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera (EMAS) maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Mitigasi dan pengendalian banjir
2. Pengembangan fasilitas publik dan infrastruktur penunjang
3. Perluasan peran Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi
4. Inovasi dalam pengelolaan air minum, sanitasi, dan persampahan
5. Penataan utilitas publik (tiang dan kabel)
6. Tata ruang, ruang terbuka hijau, dan pembangunan berkelanjutan

Masalah dan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tersebut merupakan penjabaran beberapa masalah dan isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka hubungan antara Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dengan dokumen Rencana Strategis K/L (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian ATR/BPN), Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan sangat selaras dan saling mendukung program dan kegiatan masing - masing. Sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan di daerah provinsi maupun di kementrian/lembaga atau rencana pembangunan pemerintah pusat.

Tabel Isu Strategis Perangkat Daerah						
Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pusat Kawasan Metropolitan Banjarbakula dengan jaringan infrastruktur terintegrasi	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pesat populasi dunia dan populasi lansia	Produktivitas yang masih rendah	belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Pusat aktivitas pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang mendorong pertumbuhan sektor jasa, properti, dan infrastruktur	Masih Rendahnya Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Serta Rendahnya Infrastruktur di Kawasan Permukiman		Proyeksi lonjakan populasi perkotaan hingga 65 persen dari populasi global	Perubahan struktur sosial, ditandai dengan penurunan proporsi masyarakat kelas menengah menuju kelompok rentan dan prakelas menengah	pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian serta konektivitas yang masih terbatas	Infrastruktur perkotaan yang berkualitas

Tabel 2. 9 Tabel Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 : “Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Tujuan : Meningkatnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru untuk Tahun 2025-2029 adalah :

“Mewujudkan Kota Banjarbaru Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera (EMAS)”

ELOK adalah Menjadikan Kota Banjarbaru yang estetik, nyaman, aman dan sehat.

MAJU adalah Sumber daya Manusia kota yang berkualitas berdaya saing, inovatif dan berakhlak mulia.

ADIL adalah Menjamin tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

SEJAHTERA adalah Membangun masyarakat kota yang sejahtera.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut,
ditetapkan Misi Kota Banjarbaru untuk Tahun 2025-2029 :

1. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Banjarbaru yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing.
3. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Kolaboratif dan Inovatif.

4. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Menyejahterakan.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam merumuskan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029 mengacu kepada RPJMD Kota Banjarbaru dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Keterkaitan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarbaru dengan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru , yaitu :

Misi 1 : “Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”.

Tujuan 1 yaitu Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Berkualitas, pada:

- *Sasaran 1* yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota
 - Strategi 5.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber daya Air
 - Strategi 5.2. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Strategi 5.3. Meningkatkan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Strategi 5.4. Meningkatkan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase
 - Strategi 5.5. Meningkatkan Pengembangan Permukiman
 - Strategi 5.6. Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung
 - Strategi 5.8. Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan
 - Strategi 5.9. Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi
 - Strategi 5.10. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Misi ini diwujudkan untuk masyarakat Kota Banjarbaru yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan *pembangunan infrastuktur wilayah yang berkelanjutan*. Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, diantaranya adalah dengan pengembangan



RT Mandiri, pertanian dan pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana publik (Banjarbaru Corner), serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara *meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah* dan pelestarian lingkungan hidup.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	79,02%	81,02%	83,02%	85,02%	87,02%	89,02%	91,02%	

Tabel 3. 1 Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun

**Ket: Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.*

***NSPK diambil dari UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

***Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra:**

1. merujuk sasaran atau outcome RPJMD
2. merujuk tujuan pada inmen 2 tahun 2025
3. merumuskan sendiri

***Sasaran Renstra:**

1. merujuk outcome RPJMD
2. merumuskan sendiri dari tujuan renstra

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru yang berdaya saing, nyaman, dan berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan strategi serta arah kebijakan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Strategi dan kebijakan ini difokuskan pada upaya peningkatan kualitas infrastruktur, pengelolaan ruang yang tertib, serta pelayanan publik yang efektif dan efisien. Adapun tahapan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Penahapan Pembangunan Renstra PD				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Kerangka Pemantapan	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan	Pemerataan Pusat Pertumbuhan Wilayah Berbasis Penataan	Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Ekonomi Inklusif dan	Kesinambungan Pembangunan yang Menyejahterakan dan Mendukung Kalimantan

Banjarbaru Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan	Penataan Kota yang Terintegrasi	Kota Berkelanjutan dan Tata Kelola Kolaboratif	Bernilai Tambah, serta SDM yang Produktif	Selatan Sebagai Gerbang Logistik
---	---------------------------------------	--	--	-------------------------------------

Tabel 3. 2 Penahapan Pembangunan Renstra PD

*Merujuk arah kebijakan RPJMD atau melihat Arah Kebijakan periode I RPJPD

Arah Kebijakan Renstra PD			
Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya air	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	
	Pengembangan sistem pengendalian banjir yang terpadu dan efektif		
Air Minum	Peningkatan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota .	
	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat.		
	Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.		

Arah Kebijakan Renstra PD			
Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.		
	Peningkatan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman.		
Air Limbah	Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir berbasis ekonomi sirkuler	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.	
	Peningkatan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah		
Drainase	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya air	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.	
Permukiman		Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.	
Bangunan Gedung		Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.	

Arah Kebijakan Renstra PD			
Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
Jalan	Koordinasi Pengembangan Kawasan Aerocity yang terintegrasi dengan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.	
Jasa Konstruksi		a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.	
Penataan Ruang	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.	
	Peningkatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah		

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra PD



* Kolom (4): Pendetailan atau disamakan dengan Arah Kebijakan RPMJD
(kolom (3))

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN URUSAN

4.1 Program, kegiatan dan subkegiatan

4.1.1 Program Bidang Urusan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru memiliki 10 (Sepuluh) Program yaitu :

- 1 1.03.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2 1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
- 3 1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
- 4 1.03.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
- 5 1.03.06. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
- 6 1.03.07. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
- 7 1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
- 8 1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
- 9 1.03.11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
- 10 1.03.12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

4.1.2 Kegiatan Bidang Urusan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru memiliki 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- 1 1.03.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 1.03.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 1.03.01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4 1.03.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 5 1.03.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6 1.03.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7 1.03.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8 1.03.02.2.01. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 9 1.03.02.2.02. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 10 1.03.03.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- 11 1.03.05.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 12 1.03.06.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 13 1.03.07.2.01. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 14 1.03.08.2.01. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 15 1.03.10.2.01. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- 16 1.03.11.2.02. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 17 1.03.11.2.04. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- 18 1.03.11.2.01. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- 19 1.03.12.2.01. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

- 20 1.03.12.2.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 21 1.03.12.2.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

4.1.3 Sub Kegiatan Bidang Urusan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru memiliki 60 (Enam Puluh) Sub Kegiatan yaitu :

- 1 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3 1.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- 4 1.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- 5 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 6 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 7 1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 8 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 10 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 11 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 12 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 13 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 14 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
- 15 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 16 1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 17 | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 18 | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 19 | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 20 | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 21 | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar |
| 22 | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 23 | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya |
| 24 | 1.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 25 | 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya |
| 26 | 1.03.02.2.01.0103 | Peningkatan Tanggul Sungai |
| 27 | 1.03.02.2.01.0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai |
| 28 | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
| 29 | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
| 30 | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
| 31 | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |
| 32 | 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja |
| 33 | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |
| 34 | 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan |
| 35 | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan |

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 36 | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan |
| 37 | 1.03.07.2.01.0033 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota |
| 38 | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 39 | 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| 40 | 1.03.10.2.01.0053 | Pembangunan Jalan |
| 41 | 1.03.10.2.01.0059 | Rekonstruksi Jalan |
| 42 | 1.03.10.2.01.0055 | Rehabilitasi Jalan |
| 43 | 1.03.10.2.01.0056 | Pemeliharaan Berkala Jalan |
| 44 | 1.03.10.2.01.0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan |
| 45 | 1.03.10.2.01.0069 | Pembangunan Jembatan |
| 46 | 1.03.10.2.01.0058 | Rehabilitasi Jembatan |
| 47 | 1.03.10.2.01.0052 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa |
| 48 | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi |
| 49 | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota |
| 50 | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota |
| 51 | 1.03.11.2.04.0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota |
| 52 | 1.03.11.2.04.0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota |



- | | | |
|----|-------------------|---|
| 53 | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis |
| 54 | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota |
| 55 | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang |
| 56 | 1.03.12.2.01.0007 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang |
| 57 | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang |
| 58 | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota |
| 59 | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| 60 | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang |

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pada tabel berikut :

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Infrastruktur Bidang ke-PUPR-an	Meningkatkan Kualitas Layanan Terkait Infrastruktur Ke-PUPR-an	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah		Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			
				OT1.1.1.2	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	1.03.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					JumlahDokumenHasil PenyelenggaraanWal idataPendukung Statistik Sektoral Daerah	1.03.01.2.01 .0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					JumlahDataStatistikS ektoralDaerahyangTe lahDikumpulkandanDi periksa Lingkup Perangkat Daerah	1.03.01.2.01 .0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				OT1.1.1 .2	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.03.01.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				OT1.1.1 .2	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	1.03.01.2.03 .	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	1.03.01.2.03 .0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Barang Milik Daerah pada SKPD			
					Cakupan layanan administrasi umum yang	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	1.03.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.03.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1.03.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1.03.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Perundang-undangan yang disediakan			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1.03.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.03.01.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1.03.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1.03.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1.03.01.2.07 .0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.03.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.03.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1.03.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang	1.03.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	1.03.01.2.09 .0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1.03.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1.03.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.03.01.2.09 .0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					yang dipelihara/direhabilitasi			
			Meningkatkan Kualitas Layanan Terkait Infrastruktur Ke-PUPR-an		Persentase peningkatan perlindungan banjir	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
					Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	1.03.02.2.01 .0121	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Meningkatnya Perlindungan Infrastruktur Dari Daya Rusak Air		Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan	1.03.02.2.01 .0103	Peningkatan Tanggul Sungai	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang dipelihara	1.03.02.2.01 .0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
					Persentase Kinerja Sistem Irigasi	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	1.03.02.2.02 .0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	1.03.02.2.02 .0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	1.03.02.2.02 .0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					yang dioperasikan dan dipelihara			
			Meningkatnya Akses Layanan Air Minum		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
					Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle	1.03.03.2.01 .0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Capacity dengan penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK Perkotaan atau SPAM Tematik tertentu			
			Meningkatnya Akses Layanan Air Limbah		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
					Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.03.05.2.01 .0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.05.2.01 .0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1.03.05.2.01 .0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
					Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan	1.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					pengolahan air limbah domestik di kota			
					Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	1.03.07.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1.03.05.2.01 .0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengelolaan Sistem Drainase		Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
					Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik			
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1.03.06.2.01 .0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1.03.06.2.01 .0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02 .0014	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1.03.06.2.01 .0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung		Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Negara dan Fasilitas Umum		Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01 .0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	1.03.08.2.01 .0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Meningkatny a Kinerja Pelayanan Jalan		Tingkat kemantapan jalan kota	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Persentase jalan kota yang terbangun			
					Panjang jalan yang dibangun	1.03.10.2.01 .0032	Pembangunan Jalan	
					Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	1.03.10.2.01 .0033	Rekonstruksi Jalan	
					Panjang jalan yang direhabilitasi	1.03.10.2.01 .0044	Rehabilitasi Jalan	
					Panjang jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara Berkala	1.03.10.2.01 .0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	1.03.10.2.01 .0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang jembatan yang dibangun	1.03.10.2.01 .0040	Pembangunan Jembatan	
					Panjang jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	1.03.10.2.01 .0039	Rehabilitasi Jembatan	
					Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1.03.10.2.01 .0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
			Meningkatnya Kompetensi Pengguna dan Penyedia		Persentase Layanan Informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jasa Konstruksi		penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi			
			Meningkatnya pengawasan terhadap Jasa Konstruksi		Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1.03.11.2.02 .0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
					Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	1.03.11.2.02 .0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1.03.11.2.04 .0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan	1.03.11.2.04 .0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk			
					Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	1.03.11.2.04 .0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
						1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			Meningkatny a Penyelenggar aan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	1.03.11.2.01 .0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
			Meningkatny a Penyelenggar aan		Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penataan Ruang		Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			
			Meningkatnya Kualitas Rencana Tata Ruang		Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 .0010	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 .0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1.03.12.2.01 .0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Su bkeg	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1.03.12.2.01 .0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
			Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang		Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.03 .0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase penertiban pemanfaatan ruang	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi	1.03.12.2.04 .0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	



Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Kode Program/Subkegiatan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pelaksanaan Penataan Ruang			

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/ (1)	Kegiatan/Subkegiatan Output (2)	Indikator/Outcome/Output (3)	Satuan (4)	Kondisi Awal (2024) (5)	2025		
					Target (6)	Pagu (7)	Targ et (8)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	100	100	Rp. 13.631.801.23 6	100
	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah		B	B		BB
		Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	%	90	93	Rp. 12.867.861.88 6	95
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	%	100	100	Rp. 763.939.350	100
1.03.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	3	Rp. 32.594.700	3

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/ (1)	Kegiatan/Subkegiatan Output (2)	Indikator/Outcome/Output (3)	Satuan (4)	Kondisi Awal (2024) (5)	2025		
					Target (6)	Pagu (7)	Targ et (8)
1.03.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	2	Rp. 726.344.850	2
1.03.01.2.01.00 08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0	1	Rp. 4.999.800	1
1.03.01.2.01.00 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	JumlahDokumenHasilPenyelenggaraanWalidataPe ndukung Statistik Sektoral Daerah	Data	0	1	Rp. -	1
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%	100	100	Rp. 8.504.950.686	
1.03.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bul an		61	Rp. 8.459.451.136	61
1.03.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pesentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Laporan		1	Rp. 45.499.550	1

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/ (1)	Kegiatan/Subkegiatan Output (2)	Indikator/Outcome/Output (3)	Satuan (4)	Kondisi Awal (2024) (5)	2025		
					Target (6)	Pagu (7)	Targ et (8)
1.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%	Baik	Baik	Rp. 15.949.700	
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	Rp. 15.949.700	1
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%	100	0	Rp. -	0
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	120	0	Rp. -	0
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang	%	100	100	Rp. 1.136.009.700	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Paket	8	5	Rp. 110.124.500	5
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	7	7	Rp. 267.347.500	7
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	Rp. 37.119.700	2

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/	Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025		
					Target	Pagu	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	Rp. 9.600.000	12
1.03.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	256	130	Rp. 445.161.000	85
1.03.01.2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	6	Rp. 266.657.000	6
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%	100	100	Rp. 831.270.000	100
1.03.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	110	94	Rp. 386.869.000	94
1.03.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	24	34	Rp. 368.113.000	34
1.03.01.2.07.00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	15	9	Rp. 76.288.000	9
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%	100	100	Rp. 624.762.600	100

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/ (1)	Kegiatan/Subkegiatan Output (2)	Indikator/Outcome/Output (3)	Satuan (4)	Kondisi Awal (2024) (5)	2025		
					Target (6)	Pagu (7)	Targ et (8)
1.03.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	Rp. 239.991.000	12
1.03.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp. 384.771.600	12
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	Rp. 1.754.919.200	100
1.03.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	Rp. 49.780.000	1
1.03.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	32	32	Rp. 870.197.500	32

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/	Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025		
					Target	Pagu	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.01.2.09.00 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	Unit	5	4	Rp. 325.482.000	4
1.03.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	55	80	Rp. 55.060.000	80
1.03.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/rehabilit asi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2		Rp. 425.449.700	2
1.03.01.2.09.00 11	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	60	50	Rp. 28.950.000	50
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	53,19	61,89	Rp. 52.557.075.75 0	40,77
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%		85,14		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	%	53,19	61,89	Rp. 43.683.827.25 0	37,61

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/	Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025		
					Target	Pagu	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
1.03.02.2.01.01 21	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	Unit	1	3	Rp. 17.649.743.75 0	1
1.03.02.2.01.01 03	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dipelihara	Unit	0	0	Rp. -	0
1.03.02.2.01.01 03	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan	KM	3,816	2.198, 5	Rp. 19.628.862.00 0	3,614
1.03.02.2.01.00 80	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang dipelihara	KM	11,443	8,162	Rp. 6.405.221.500	7,395
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	%		36,86	Rp. 8.873.248.500	43,86

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/	Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025		
					Target	Pagu	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
1.03.02.2.02.00 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	KM	0,56	0,56	Rp. 4.908.547.500	0,21
1.03.02.2.02.00 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	KM	0,17	0,17	Rp. 1.059.456.500	0,12
1.03.02.2.02.00 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	KM	7,70	7,70	Rp. 2.905.244.500	4
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	75,82	79,85	Rp. 10.632.598.00 0	83,88
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	75,82	79,85	Rp. 10.632.598.00 0	83,88

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/	Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025		
					Target	Pagu	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Daerah Kabupaten/Kota						
1.03.03.2.01.00 32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK Perkotaan atau SPAM Tematik tertentu	SR	51701	338	Rp. 10.632.598.00 0	800
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	%	15,27	15,27	Rp. 11.113.234.00 0	20,18
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	15,27	17,72	Rp. 11.113.234.00 0	20,18
1.03.05.2.01.00 33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	175	75	Rp. 2.170.445.000	75
1.03.05.2.01.00 38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	22	5	Rp. 1.557.559.000	5

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Program/	Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025		
					Target	Pagu	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga	10415	400	Rp. 7.385.230.000	800
1.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	%				20,18
1.03.07.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai					20,18
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga				800
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%		65,68	Rp. 27.752.562.998	50,95

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/	Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025		
					Target	Pagu	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase kota yang berfungsi baik	%	54,55	65,68	Rp. 27.752.562.998	50,95
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan		10	Rp. 15.111.893.958	2
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan		0		26
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan		55	Rp. 11.556.775.190	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan		5	Rp. 1.083.893.850	4
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	Rp. 13.553.500.200	100

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/ (1)	Kegiatan/Subkegiatan Output (2)	Indikator/Outcome/Output (3)	Satuan (4)	Kondisi Awal (2024) (5)	2025		
					Target (6)	Pagu (7)	Targ et (8)
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	%	100	100	Rp. 13.553.500.20 0	100
1.03.08.2.01.00 21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	Rp. 11.292.831.70 0	2
1.03.08.2.01.00 18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Bangunan Gedung		11	Rp. 2.260.668.500	5

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/	Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025		
					Target	Pagu	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	%	67,65	81,60	Rp. 129.369.919.0 15	67,88
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	%	67,65	67,73	Rp. 129.369.919.0 15	67,86
		Persentase jalan kota yang terbangun	%		96,72		
1.03.10.2.01.00 32	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	KM	0,452	0,094	Rp. 2.343.842.600	0,326
1.03.10.2.01.00 33	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	KM	22,852	7,179	Rp. 62.403.191.95 0	6,484
1.03.10.2.01.00 44	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	KM	9,286	2,056	Rp. 15.764.148.40 0	3,343
1.03.10.2.01.00 34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara Berkala	KM	11,29	2,119	Rp. 32.214.189.00 0	3,578
1.03.10.2.01.00 46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	KM	7,936	3,860	Rp. 7.787.835.800	4,407

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/	Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025		
					Target	Pagu	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.10.2.01.00 40	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	1(Buah)	20	Rp. 4.992.928.650	10
1.03.10.2.01.00 39	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	Meter	5(Jembata n)	10	Rp. 3.512.962.615	10
1.03.10.2.01.00 36	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	1,88	1,250	Rp. 350.820.000	10
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	Rp 145.209.000	100
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	%	100	100	Rp 66.609.000	100
1.03.11.2.02.00 15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Layanan Informasi	1	1	Rp. 29.411.000	1

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/	Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025		
					Target	Pagu	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.03.11.2.02.00 13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	30	30	Rp. 37.198.000	30
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	Rp 78.600.000	100
1.03.11.2.04.00 04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	20	20	Rp. 34.684.000	20
1.03.11.2.04.00 05	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi	5	5	Rp. 24.303.000	5
1.03.11.2.04.00 07	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	5	5	Rp. 19.613.000	5

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/ (1)	Kegiatan/Subkegiatan Output (2)	Indikator/Outcome/Output (3)	Satuan (4)	Kondisi Awal (2024) (5)	2025		
					Target (6)	Pagu (7)	Targ et (8)
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	#REF!	%	0	0	Rp. -	87
1.03.11.2.01.00 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	0	0	Rp. -	30
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	75	79,17	Rp 3.537.701.000	83,33
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	%	25	37,50	Rp 2.897.333.000	50
1.03.12.2.01.00 10	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	2	Rp. 747.797.000	2
1.03.12.2.01.00 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	6	3	Rp. 1.933.536.000	3

Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/	Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator/Outcome/Output	Satuan	Kondisi Awal (2024)	2025		
					Target	Pagu	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pelaksanaan Penataan Ruang						
1.03.12.2.01.00 07	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	0	7		7
1.03.12.2.01.00 13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	0	2	Rp. 216.000.000	2
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	Rp 372.870.000	100
1.03.12.2.03.00 03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1	1	Rp. 372.870.000	1
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	%	100	100	Rp 267.498.000	100



Rencana Program/Kegiatan/Sub K							
Bidang Urusan/Progra m/ (1)	Kegiatan/Subkegiatan Output (2)	Indikator/Outcome/Output (3)	Satuan (4)	Kondisi Awal (2024) (5)	2025		
					Target (6)	Pagu (7)	Targ et (8)
1.03.12.2.04.00 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	25	25	Rp. 267.498.000	25

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

**Outcome: hasil dari program yang berkontribusi ke sasaran*

**Output: hasil dari sub kegiatan yang berkontribusi ke outcome*

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah				
N o.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Bangunan Gedung	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Negara dan Fasilitas Umum	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Pemerintah dan Rumah Dinas Wakil Walikota
				Pembangunan Graha Banjarbaru
				Pembangunan Stadion Olahraga
				Pembangunan Gedung Islamic Center
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Kualitas Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota- Pembangunan Jalan	Pembangunan Underpass/Flyover
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pembangunan Underpass/Flyover
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Meningkatnya Akses Layanan Air Minum	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
5	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kapasitas Kompetensi Pencari Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	

Tabel 4. 3 Tabel Program Prioritas

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan



sasarannya. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kota Banjarbaru 2025-2029.

Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2025-2029, target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2025-2029 dan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) PD									
No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	100	79,85	83,88	87,91	91,94	95,97	95,97
2	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan	%	15,27	16,27	19,02	21,76	24,51	27,25	27,25



Indikator Kinerja Utama (IKU) PD									
No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
	pengolahan air limbah domestik Kota								
3	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	53,19	61,89	70,07	41,44	45,26	49,09	49,09
4	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	79,88	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	63,15	36,81	40,77	45,07	49,98	54,89	54,89
6	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat kemantapan jalan kota	%	81,42	81,60	67,88	68,03	68,21	68,42	68,42
8	Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraa n dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata	%	75,00	79,17	83,33	66,67	91,67	95,83	95,83



Indikator Kinerja Utama (IKU) PD									
No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
	Ruang Wilayah (RTRW)								

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator Kinerja yang berfungsi untuk mengukur serta mengevaluasi kinerja instansi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kunci PD										
No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	60,54	60,9	61,20	61,50	61,70	61,90	62,10	
2	Persentase peningkatan perlindungan	%	0	0	0	0	0	0	0	



Indikator Kinerja Kunci PD										
No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota									
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	0	0	0	0	0	0	0	
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	35	36,81	40,77	45,07	49,98	54,89	59,8	
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum	%	75,82	79,85	83,88	87,91	91,94	95,97	100	



Indikator Kinerja Kunci PD										
No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota									
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	15,27	17,72	20,18	22,63	25,09	27,54	30	
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF	%								



Indikator Kinerja Kunci PD										
No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kabupaten/Kota									
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	67,68	67,75	67,88	68,03	68,21	68,42	68,65	
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	42,96	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi	%	60	70	70	70	70	70	70	



Indikator Kinerja Kunci PD										
No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan									
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	100	80	60	40	20	20	20	
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	80,95	81,76	82,58	83,41	84,24	85,05	85,93	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).



2. Indikator SPM berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Tabel 4. 6 Indikator Pelayanan Minimal SPM

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Banjarbaru yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025-2029.

Sasaran Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Banjarbaru.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Banjarbaru.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan atau target kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti



(*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

Banjarbaru, 10 Juli 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Banjarbaru



Ir.Eka Yuliesda Akbari, ST.MT
Pembina Utama Muda



BANJARBARU

Emas

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025